

# INTEGRASI SOSIAL MASYARAKAT DESA PESISIR DALAM MENINGKATKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN WORI KABUPATEN MINAHASA UTARA

ISMAIL RACHMAN

**Abstrak:** Potensi sumberdaya alam yang ada di wilayah Kecamatan Wori masih sangat besar. Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar dapat dilihat dari keanekaragaman ikan, potensi karang, serta hutan bakau yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pengembangan masyarakat nelayan di wilayah pesisir.

Pembangunan bagi masyarakat nelayan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari karakteristik dan kehidupan masyarakat nelayan. Masyarakat di wilayah Kecamatan Wori adalah masyarakat yang heterogen karena terdiri dari berbagai macam suku, diantaranya adalah suku Sangir, Borgo, Suku Bajo, Suku Minahasa, sebagian suku Jawa, Gorontalo, Bugis dan sebagian pula berasal dari suku-suku lainnya yang di Indonesia. Melalui peningkatan integrasi sosial bagi masyarakat pesisir, maka akan membangkitkan semangat bagi masyarakat nelayan serta mampu meningkatkan kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

**Keywords:** Social Community Integration, Policy and Development

## PENDAHULUAN

Isu tentang trend Pembangunan dibidang Sosial menjadi salah satu isu sentral yang telah mendapatkan perhatian pemerintah. Di Indonesia pun sangat terasa dari dampak krisis global berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi masyarakat miskin terutama dalam penentuan kebijakan harga bahan pokok, fluktuasi pasar yang semakin tidak menentu, upah minimum Regional, dan berbagai kebijakan pemerintah lainnya yang turut berdampak pada masyarakat miskin.

Saefuddin,dkk (2003) mengatakan bahwa melalui Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Pemerintah telah menyediakan program khusus dalam penanggulangan kemiskinan yakni melalui penyediaan kebutuhan pokok untuk keluarga miskin berupa pengadaan pangan, pelayanan dasar dibidang kesehatan, pendidikan, dan perumahan, pengembangan sistem keterjaminan sosial dan pengembangan budaya usaha masyarakat miskin. Selain itu perhatian terhadap masyarakat miskin dituangkan dalam pemberian bantuan untuk program-program pendidikan, kesehatan, kependudukan dan tenaga kerja. Sejak keluarnya Inpres No. 5

tahun 1995 tentang program penanggulangan kemiskinan, hingga program-program lainnya yang pernah direalisasikan untuk menanggulangi angka kemiskinan di Indonesia ternyata tidak berhasil menurunkan angka kemiskinan penduduk dari beban penderitaan. Buktinya program KUT, Jaring pengaman Sosial (JPS), bantuan penanggulangan kemiskinan melalui PKPS-BBM baik berupa penanganan program Infra struktur Pedesaan/Perkotaan, maupun pengembangan usaha yang pernah dilakukan juga banyak mengalami hambatan. Pembiayaan program JPS Telah berakhir sejak tahun 2002, pada hal hingga saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup banyak dan mereka tetap memerlukan bantuan pelayanan sosial dasar. Oleh karena itu harus mulai dipikirkan bagaimana pola jaminan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat miskin dapat berlangsung terus ketika proyek JPS berakhir.

Saat ini Pemerintah juga telah menyediakan program dibidang penanggulangan kemiskinan berupa Bantuan Tunai Langsung (BLT) dan berbagai program yang ditawarkan melalui PNPM Mandiri.

Walaupun pemerintah sudah berupaya mengurangi beban penduduk dari

kemiskinan namun kemiskinan tetap masih menjadi program/ prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di wilayah pesisir Kecamatan Wori yang tersebar pada 18 Desa. Untuk penentuan sampel Desa maka ditetapkan 9 desa sampel dan tiap sampel desa akan ditetapkan sebanyak 10 responden sehingga jumlah seluruh sampel respondennya adalah berjumlah 90 responden.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian deskriptif dengan menganut pendekatan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2003) dimana penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable satu dengan variable yang lain

Teknik pengumpulan dan pengolahan data yang disajikan dalam penelitian ini adalah Interview atau wawancara, penggunaan kuesioner maupun observasi menurut petunjuk yang digunakan oleh Sugiyono (2003). Wawancara dapat dilakukan dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dapat digunakan sesuai dengan instrumen penelitian berdasarkan daftar pertanyaan ataupun angket yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah suatu cara yang dilakukan untuk mewawancarai para responden secara mendalam yang tidak menggunakan petunjuk berdasarkan angket atau daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Penggunaan kuesioner adalah merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat berbagai daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti. Selain menggunakan berbagai teknik pengumpulan maupun

pengolahan data tersebut diatas maka peneliti juga melakukan teknik pengumpulan data primer maupun data sekunder. Dimana data primer dapat diperoleh dengan menggunakan petunjuk dan cara melalui daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Sedangkan data sekunder adalah merupakan bentuk dapat pendukung dalam penelitian ini.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif seperti apa yang dikemukakan oleh Sugiyono (2003) dimana tujuannya adalah untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya tanpa menggunakan analisis yang lazimnya dikemukakan berdasarkan teknik analisis statistik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. INTEGRASI SOSIAL MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR**

Pemerintah telah menyediakan program dibidang penanggulangan kemiskinan berupa Bantuan Tunai Langsung (BLT) yang diberikan kepada rakyat miskin bahkan bukan Cuma BLT tetapi pemberian beras miskin (Raskin) masih tetap diberikan oleh pemerintah dan berbagai program yang ditawarkan melalui PNPM Mandiri.

Walaupun pemerintah sudah berupaya mengurangi beban penduduk dari kemiskinan namun kemiskinan tetap masih menjadi program/ prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Sebab desa telah menjadi tumpuan dan harapan masyarakat dalam berusaha.

Salah satu sikap sosial dari pemahaman makna integrasi sosial dari masyarakat pesisir adalah proses kematangan terhadap keterjaminan sosial melalui pemenuhan pelayanan dasar seperti pangan, papan, pendidikan, kesehatan.

Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok dari masyarakat pesisir tentu akan menjadi modal dasar integrasi sosial dalam membangun terutama dalam menunjang berbagai kebijakan pemerintah, dapat membangkitkan gairah partisipasi masyarakat, ikut membangun secara bersama baik dalam bidang ekonomi, politik, social, budaya, ketahanan pangan dan berbagai isu tentang kebijakan sosial. Dengan demikian integrasi sosial akan menjadi modal dasar bagi masyarakat di wilayah pesisir dalam menunjang berbagai kebijakan dibidang penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan. Adapun integrasi social masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah pesisir antara lain:

**a. Pembangunan bagi Masyarakat Nelayan.**

Pembangunan bagi masyarakat nelayan tentu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari karakteristik dan kehidupan masyarakat nelayan. Diakui bersama bahwa masyarakat di wilayah pesisir adalah masyarakat nelayan dengan bagian terbesar hidup mereka telah menggantungkan kebutuhan pokoknya dari wilayah pesisir dan laut. Masyarakat di wilayah Kecamatan Wori adalah masyarakat yang heterogen karena terdiri dari berbagai macam suku, diantaranya adalah suku Sangir, Borgo, Suku Bajo, Suku Minahasa, sebagian suku Jawa ,Gorontalo, Bugis dan sebagian pula berasal dari suku-suku lainnya yang di Indonesia. Sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir ini memiliki pola hidup yang lebih bermuara pada usaha perikanan. Laut dan wilayah pesisir menjadi modal utama dalam pengembangan usaha dalam mencari nafkah untuk keperluan keluarganya. Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat di wilayah ini sebelumnya masyarakat nelayan di Kecamatan Wori umumnya masih mempergunakan alat-alat tradisional bila mereka turun melaut.

Penangkapan masih terbatas pada kemampuan mendayung dengan peralatan sederhana. Dengan demikian laut merupakan satu-satunya sumber mata pencaharian bagi masyarakat di wilayah pesisir. Pada daerah atau wilayah tertentu telah dijadikan tempat penangkapan ikan terutama ikan karang, ikan tongkol, ikan tude dan ikan malalugis cumi, ikan pelagis dan ada sebagian yang menangkap ikan tuna.

Untuk turun melaut umumnya para nelayan di kawasan ini harus mempunyai pengetahuan dasar tentang Navigasi. Pengetahuan itu tentu berkaitan dengan pemahaman mengenai angin, arus laut, posisi matahari, letak bintang, serta perhitungan bulan untuk pasang surut air laut dan mengetahui sewaktu-waktu bila terdapat banyak ikan. Pengetahuan dasar yang harus dikuasai oleh seorang nelayan adalah mata angin. Masyarakat Nelayan di wilayah ini telah mengenai 16 mata angin yaitu utara, timur, selatan dan barat. Selanjutnya mereka juga mengenal utara timur laut, timur tenggara, tenggara, selatan tenggara, selatan barat daya, barat daya, barat-barat laut dan utara barat laut.

Dari gambaran data menunjukkan bahwa keadaan masyarakat nelayan bila mendapatkan hasil saat turun melaut sebagian besar tidak pernah menyisihkan pendapatan. Ketidakmampuan masyarakat nelayan dalam menyisihkan pendapatannya disebabkan oleh pendapatan mereka yang pas-pasan. Berkaitan dengan sikap mental juga masalah waktu tidak pernah dihargai oleh masyarakat nelayan. Setelah pulang dari melaut pada malam hari, maka banyak waktu yang luang dan tidak dimanfaatkan oleh nelayan. Sehariannya mereka tidur sebab kemungkinan mereka mengalami kelelahan setelah melaut.

**b. Peningkatan usaha melalui pemanfaatan hasil laut.**

Masyarakat nelayan biasanya peka dengan perubahan yang ada disekelilingnya, sehingga usaha yang dilakukan oleh mereka

tidak mengalami perubahan yang berarti. Pada hal kalau ada keragaman usaha, maka sudah barang tentu akan menopang peningkatan taraf hidup.

Wira usaha adalah merupakan alternatif yang paling tepat untuk dapat dilakukan oleh masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan yang memiliki wira usaha akan lebih baik taraf hidupnya bila dibandingkan dengan masyarakat nelayan yang tidak memiliki wira usaha.

Salah satu pengembangan wira usaha adalah melalui pemanfaatan hasil laut bagi masyarakat nelayan selain menangkap ikan. Bila diamati potensi wilayah pesisir di Kecamatan Wori sebenarnya dapat menjanjikan peningkatan usaha bagi masyarakat nelayan apabila dimanfaatkan secara intensif. Pemanfaatan hasil laut antara lain dapat dilakukan melalui budi daya rumput laut. Budidaya rumput laut sampai saat ini sudah dimanfaatkan atau dikembangkan oleh masyarakat di Kecamatan Wori khususnya di Desa Nain, pulau Mantehage dan Desa Kulu. Pada tahun 1990-an rumput laut di desa Nain dapat mencapai hasil yang cukup menggembirakan dimana hasil produksinya dapat mencapai 200 Ton lebih dalam setiap kali panen, masyarakat nelayan pada saat itu cukup berjaya dengan hasil pemanfaatan budidaya rumput laut, namun pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 ketika terjadi krisis ekonomi maka pasaran rumput laut mengalami penurunan produksi serta kelesuan pada masyarakat nelayan yang disebabkan turunnya harga waktu itu. Pada hal kalau dibandingkan dengan hasil perikanan juga budidaya rumput laut cukup bagus. Sampai saat ini pun masyarakat sudah mulai mengembangkannya namun baru dalam tahap pengembangan produksi dimana disponsori oleh Dinas Perikanan yang bekerjasama dengan para pengusaha. Selain budidaya rumput laut maka budidaya kerang mutiara juga sebenarnya sangat baik untuk dapat dikembangkan karena memiliki areal yang

cukup representative untuk dikembangkan dalam kaitan dengan budidaya, seperti teripang, budidaya ikan karang yang dipelihara di karamba atau jarring apung, namun sampai saat ini masyarakat belum memiliki animo dalam mengembangkan usahanya dalam kaitan dengan budidaya laut.

## **B. BERBAGAI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN EKONOMI DAN TARAF HIDUP MASYARAKAT NELAYAN DI WILAYAH PESISIR.**

Tujuan pembangunan Nasional Bangsa Indonesia yang ditetapkan dalam GBHN 1998 yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur terus dilaksanakan. Oleh karena itu dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut maka pemerintah Indonesia telah menggali sumberdaya alam yang ada disamping pengembangan sumberdaya manusia. Salah satu pokok perhatian pemerintah Indonesia yang menjadi tumpuan pembangunan Nasional adalah dengan dikembangkannya Wilayah Indonesia bagian timur sebagai suatu wilayah yang terkebelakang pembangunannya bila di bandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya. Salah satu solusi pemerintah adalah dengan dikembangkannya Menteri Percepatan Pembangunan di Kawasan Timur Indonesia sebagai salah satu upaya untuk memecahkan masalah-masalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi seperti yang dikemukakan oleh H. Sumitro Maskun dkk (1993).

Telah diakui bersama bahwa potensi sumberdaya alam yang ada di daerah ini sebagian besar masih belum dapat terjamah seperti sumberdaya alam bidang pertanian, pertambangan, Pariwisata termasuk juga bidang kelautan dan perikanan.

Bidang kelautan dan perikanan seperti apa yang dikemukakan oleh R. Dahuri (1997) khususnya di Propinsi Sulawesi Utara

memiliki peluang sebagai salah satu upaya untuk mencapai pertumbuhan. Hanya saja potensi yang sangat besar belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat ditambah lagi dengan rendahnya kualitas sumberdaya manusia khususnya masyarakat nelayan didalam menggali potensi bidang kelautan dan perikanan. Oleh karena itu perhatian pemerintah akan dapat dijadikan momentum dalam mengembangkan ekonomi masyarakat nelayan di wilayah pesisir di daerah ini.

Tantangan dalam mencapai pertumbuhan khususnya bagi masyarakat nelayan di wilayah pesisir adalah berkaitan dengan aspek teknologi, khususnya transportasi dibidang penangkapan, penanganan pasca panen, permodalan, pasar, kejayaan usaha, sikap mental ; tantangan alam akan menjadi perhatian penting bagi masyarakat nelayan di wilayah pesisir dalam mengembangkan pendapatan dan taraf hidupnya.

Sedangkan hal pokok yang menjadi perhatian pemerintah (kebijakan pemerintah) adalah berkaitan dengan kepedulian untuk dapat melibatkan berbagai paket program ,rangsangan permodalan, jalinan kemitraan dan jaminan pasar yang sangat menguntungkan masyarakat nelayan itu sendiri, antara lain :

#### **a. Pengembangan paket program.**

Pengembangan paket program merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dikaji bagi pemerintah dalam mengangkat harkat dan martabat masyarakat nelayan. Program-program yang perlu dilakukan adalah menyangkut pemberian penyuluhan bagi masyarakat nelayan tentang arti pentingnya mengembangkan usaha , karena diketahui bersama bahwa masyarakat nelayan memiliki keterbatasan yang kompleks bila dibandingkan dengan masyarakat lainnya terutama dalam mendapatkan informasi, pengetahuan, sarana dan prasarana dibidang perikanan, bahkan

untuk meningkatkan produktivitas para nelayan.

Dari gambaran data dapat disimpulkan bahwa ternyata masyarakat nelayan masih mengharapkan uluran tangan pemerintah dalam membina mereka untuk meningkatkan taraf hidupnya oleh karena itu paket program khususnya untuk lebih meningkatkan penyuluhan kepada para nelayan akan sangat penting untuk dilakukan.

Adapun cara penyuluhan yang pernah dilakukan kepada para nelayan hanya berkaitan dengan penanganan pasca panen khususnya metode pengasapan. Selain itu dilakukan pula penyuluhan mengenai penggunaan alat pancing yang efektif.

Walaupun penyuluhan kadang-kadang dilakukan namun sedikitnya dapat membantu para nelayan dalam rangka meningkatkan usahanya.

Sehingga bagi para nelayan yang sudah diberikan penyuluhan maka justru mereka dapat meningkatkan usahanya. Selain menyangkut program penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah melalui PPL pengembangan paket program juga dapat dilakukan dengan pemberian peralatan motorisasi seperti paket motor temple ketinting. Maksud dari pemberian paket program seperti ini diarahkan agar para nelayan nantinya dapat meningkatkan produktivitas dan jangkauan penangkapan serta mempercepat jaringan penangkapan itu sendiri.

Dari apa yang diamati dilokasi penelitian ternyata sebagian besar motor ketinting dapat diupayakan melalui bantuan pemerintah, namun bantuan ini dapat diberikan khususnya bagi nelayan yang sudah diberikan pelatihan dan penyuluhan. Tetapi dapat diketahui bahwa pemberian paket program seperti motor tempel hanya sedikit yang dapat memanfaatkannya dengan cara untuk dikembangkan dengan tujuan paket program bergulir. Dari pemberian paket program motor temple tersebut ternyata pula ada yang berhasil dan ada pula yang tidak

berhasil. Yang berhasil justru mereka yang memiliki kemampuan dalam berusaha dan pernah diberikan penyuluhan serta memiliki mentalitas berusaha yang baik dan ulet.

**b. Usaha pemberian permodalan.**

Masalah permodalan juga merupakan masalah yang sangat dirasakan oleh para nelayan terutama dalam memperoleh peralatan untuk menangkap ikan atau alat pancing dan berbagai kebutuhan penangkapan lainnya.

Permodalan yang dimaksudkan disini adalah pemberian bantuan yang diberikan oleh pemerintah terutama kepedulian dari pihak Bank dalam memberikan paket kredit lunak kepada para nelayan. Namun usaha untuk memberikan kredit kepada para nelayan sangat diperlukan ketelitian dan kehati-hatian kepada mereka sebab mentalitas nelayan kurang baik, disebabkan oleh adanya sikap boros, pola hidup konsumtif, kalau ada uang dipergunakan untuk bersantai, pesta for a dan mabuk-mabukan.

Dari gambaran data dapat disimpulkan bahwa ternyata sebagian besar masyarakat atau para nelayan mengatakan belum pernah mendapatkan kredit atau belum mendapatkan bantuan permodalan dari pihak perbankan. Program paket ketahanan pangan yang sudah dilakukan sejak dua tahun terakhir hanya dimanfaatkan oleh sebagian kecil nelayan yang ada khususnya di Propinsi Sulawesi Utara namun masyarakat di wilayah Kecamatan Wori masih belum banyak terjangkau oleh paket program perikanan yang ada, mungkin dari pihak perbankan juga menilai lebih selektif jangan sampai ada kredit macet.

Apabila pada tahap sekarang ini dunia sedang dilanda resesi ekonomi lebih khusus lagi bagi pemerintah Indonesia ,namun perlu juga dipikirkan bahwa pemberian permodalan harus perlu didukung dengan kelayakan usaha karena tanpa adanya kelayakan usaha maka para nelayan tidak akan dapat berbuat banyak

untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatannya.

**3. Bidang Pemasaran.**

Masalah pemasaran juga merupakan salah satu hal yang turut mendapatkan perhatian bagi para nelayan karena bagaimanapun produksi perikanan cukup besar apabila tidak didukung dengan pasar maka usaha yang dilakukan oleh para nelayan akan menjadi sia-sia.

Masyarakat nelayan seringkali mendapatkan hasil yang banyak namun apabila dijual harga ikan justru akan murah sehingga pendapatannya juga akan rendah. Oleh karena itu fluktuasi harga yang tidak menentu maka akan mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat nelayan dengan ketidakpastian.

Dari gambaran data diatas dapat disimpulkan bahwa ternyata sebagian besar hasil produksi ikan telah dijual kepada para tibo-tibo. Hal ini dapat dimaklumi bahwa ketergantungan kepada tibo-tibo sangat besar karena memang sebelum nelayan pergi melaut maka mereka sudah meminjam uang kepada tibo-tibo. Jadi ada timbale balik antara tibo-tibo dengan para nelayan, selain itu juga nelayan tidak mau mengambil resiko cukup besar jangan sampai hasil produksi ikan tidak akan laku dijual lebih baik diberikan kepada tibo-tibo kendatipun harga produksi ikan dibawah standar.

**C. INTEGRASI SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN.**

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang terangkum dalam pembukaan UUD 1945. Pembangunan Nasional juga merupakan bagian dari kehendak rakyat untuk melakukan

serangkaian upaya terpadu guna mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Konsep pembangunan nasional yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bermula dari konsep keterpaduan pembangunan lintas sektoral dan lintas Daerah yang diselenggarakan secara sadar oleh pemerintah Daerah bersama Rakyat di daerah. Pemerintah Indonesia dewasa ini sedang giat-giatnya melaksanakan program pembangunan diberbagai sektor kehidupan dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu untuk mencapai kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dalam mencapai tujuan yang diharapkan adalah dengan meningkatkan lebih aktifnya masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam bidang pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan tentu akan menginginkan suatu bentuk perubahan. Tanpa adanya perubahan didalam masyarakat, maka pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan tidak akan dapat berhasil dengan baik. Seperti apa yang dikemukakan oleh Rostow .W. dalam Arsyad L. 2004 bahwa untuk mencapai tahap tinggal landas maka diperlukan prasyarat utama yaitu perubahan-perubahan yang bersifat fundamental diantaranya perubahan struktur social masyarakat, perubahan sistem ekonomi dan perubahan sistem politik dari yang bersifat tradisional menjadi lebih modern .

Oleh karena itu proses pembangunan nasional perlu mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia untuk dapat dimanfaatkan, terutama bagi masyarakat nelayan yang memiliki potensi dalam melaksanakan pembangunan serta menunjang penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu hal yang paling penting bagi masyarakat nelayan dalam usaha menunjang pembangunan adalah melalui keikutsertaan

mereka terhadap kegiatan pembangunan yang ada di desa.

Apabila diamati bahwa tingkat partisipasi masyarakat nelayan di wilayah Kecamatan Wori sangat besar hal ini disebabkan karena adanya dorongan pemerintah desa dan masyarakat desa khususnya masyarakat nelayan untuk ikut secara bersama-sama membangun desanya.

Dari gambaran data diatas dapat terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat nelayan dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di Kecamatan Wori sebagian besar menyatakan adalah sangat tinggi yaitu 38,90 %, dan 36,60 % adalah memberikan pernyataan bahwa tingkat partisipasi cukup tinggi serta 24,50 % memberikan pernyataan bahwa tingkat partisipasi adalah sangat rendah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat nelayan dalam pelaksanaan pembangunan adalah sangat tinggi.

Dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan maka masyarakat desa juga ikut ambil bagian dalam membantu pemerintah desa dalam memberikan partisipasi terhadap kemajuan desa. Aplikasi dari kepedulian masyarakat desa dapat dilakukan melalui penyaluran aspirasi lewat Badan Permusyawaratan Desa. Dimana badan ini memiliki kepedulian untuk membantu pemerintah desa dan menjadi lembaga mitra dengan pemerintah desa.

Menurut Suharto (2001), bahwa BPD menjadi mitra dengan pemerintah desa yang memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Mengayomi adat istiadat.
- b. Membuat peraturan desa.
- c. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- d. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Adanya fungsi BPD tentu akan sangat memungkinkan keterlibatan rakyat

desa untuk ikut ambil bagian dalam proses pengambilan kebijakan-kebijakan di desa. Sejalan dengan itu BPD berkewajiban untuk mendukung kelancaran jalannya pemerintahan desa, melaksanakan demokrasi, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, APBN (desa) dan keputusan Kepala Desa serta menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara bertanggung jawab. (Timur Mahardika, 2001) Dengan eksistensi BPD paling tidak membuka tabir dan arus angin yang kuat bagi penguatan politik rakyat paling bawah dan merupakan proses pendewasaan politik rakyat. Sasaran pendewasaan politik rakyat adalah di mana rakyat ditempatkan dalam ruang yang terbuka untuk ber demokrasi. Kehadiran BPD setidaknya menjadi agenda pembaharuan yang memiliki makna positif bagi masyarakat desa dalam integrasi social untuk membangun. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi makro agar proses penguatan rakyat akan benar-benar dapat menjadi wahana membangkitkan partisipasi masyarakat desa.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. KESIMPULAN**

1. Potensi sumberdaya alam yang ada di wilayah Kecamatan Wori masih sangat besar. Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar dapat dilihat dari keanekaragaman ikan, potensi karang, serta hutan bakau yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pengembangan masyarakat nelayan di wilayah pesisir.
2. Pembangunan bagi masyarakat nelayan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari karakteristik dan kehidupan masyarakat nelayan. Masyarakat di wilayah Kecamatan Wori adalah masyarakat yang heterogen karena terdiri dari berbagai macam suku, diantaranya adalah suku Sangir, Borgo, Suku Bajo, Suku Minahasa, sebagian suku Jawa ,Gorontalo, Bugis dan sebagian pula berasal dari suku-suku lainnya yang di Indonesia. Sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir ini memiliki pola hidup yang lebih bermuara pada usaha perikanan. Laut dan wilayah pesisir menjadi modal utama dalam pengembangan usaha dalam mencari nafkah untuk keperluan keluarganya.
3. Dalam sistem mata pencaharian terutama dalam usaha penangkapan masih terbatas pada kemampuan mendayung dengan peralatan sederhana. Untuk turun melaut umumnya para nelayan di kawasan ini harus mempunyai pengetahuan dasar tentang Navigasi. Pengetahuan itu tentu berkaitan dengan pemahaman mengenai angin, arus laut, posisi matahari, letak bintang, serta perhitungan bulan untuk pasang surut air laut dan mengetahui sewaktu-waktu bila terdapat banyak ikan.
4. Salah satu bagian yang terpenting bagi masyarakat nelayan adalah Pembangunan mental. Sebab pembangunan mental juga menjadi salah satu pendorong dalam pengembangan usaha. Diakui bersama bahwa sikap mental masyarakat nelayan masih sangat lemah dalam membangun, hal ini tercermin dari sikap boros kurangnya penghargaan terhadap waktu, dan suka bersenang-senang kalau mendapatkan uang atau keuntungan. Sikap seperti yang sudah diuraikan diatas jelas dapat melemahkan kehidupan masyarakat nelayan. Hal ini dapat terbukti dari hasil penelitian terutama dalam menyisihkan sebagian hasil pendapatan dimana 94, 40 % masyarakat nelayan tidak pernah menyisihkan sebagian pendapatannya. Selain kurangnya penghargaan terhadap waktu, maka hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah menyangkut keadaan masyarakat yang kurang berdisiplin. Pada hal disiplin dapat dibutuhkan dalam rangka peningkatan usaha. Setiap

masyarakat yang memiliki disiplin yang tinggi tentu akan sangat berhasil begitu pula sebaliknya dengan masyarakat nelayan yang kurang memiliki disiplin pasti dalam segala hal akan gagal. Oleh karena itu cerminan sikap mental juga akan terlihat pada keadaan disiplin.

5. Bahwa pembangunan dibidang perikanan adalah berhubungan erat dengan factor manusia. Dalam hal ini termasuk modernisasi untuk mengubah sikap mental masyarakat nelayan dan petani ikan ke arah membuka diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penerapan teknologi bagi masyarakat nelayan hendaknya didasarkan pada permasalahan dan kebutuhan.
6. Pelaksanaan pembangunan sub sector perikanan di titikberatkan pada usaha peningkatan produktivitas untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan khususnya di wilayah pesisir memang sudah lama dikembangkan. Namun pada kenyataannya hasil yang didapat belum merata bagi setiap nelayan dimana pada umumnya menunjukkan bahwa produksi dan produktivitas masih tetap rendah. Berdasarkan hasil penelitian ternyata bahwa nelayan yang menggunakan motor temple baru sedikit yaitu sekitar 79 orang sedangkan motor ketinting adalah 104 orang.
7. Salah satu pengembangan wira usaha adalah melalui pemanfaatan hasil laut bagi masyarakat nelayan selain menangkap ikan. Bila diamati potensi wilayah pesisir di Kecamatan Wori sebenarnya dapat menjanjikan peningkatan usaha bagi masyarakat nelayan apabila dimanfaatkan secara intensif. Pemanfaatan hasil laut antara lain dapat dilakukan melalui budi daya rumput laut. Selain budidaya rumput laut maka budidaya kerang mutiara juga sebenarnya sangat baik untuk dapat

dikembangkan karena memiliki areal yang cukup representatif untuk dimanfaatkan dalam kaitan dengan budidaya, seperti teripang, budidaya ikan karang yang dipelihara di karamba atau jarring apung, namun sampai saat ini masyarakat belum memiliki animo dalam mengembangkan usahanya dalam kaitan dengan budidaya laut.

8. Proses pembangunan nasional perlu mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia untuk dapat dimanfaatkan, terutama bagi masyarakat nelayan yang memiliki potensi dalam melaksanakan pembangunan serta menunjang penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, hal yang paling penting bagi masyarakat nelayan dalam usaha menunjang pembangunan adalah melalui keikutsertaan mereka terhadap kegiatan pembangunan yang ada di desa. Apabila diamati bahwa tingkat partisipasi masyarakat nelayan di wilayah Kecamatan Wori sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi tenaga dimana terdapat 80 % masyarakat yang memanfaatkan partisipasi tenaga.
9. Dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan maka masyarakat desa juga ikut ambil bagian dalam membantu pemerintah desa dalam memberikan partisipasi terhadap kemajuan desa. Aplikasi dari kepedulian masyarakat desa dapat dilakukan melalui penyaluran aspirasi lewat Badan Permusyawaratan Desa. Dimana badan ini memiliki kepedulian untuk membantu pemerintah desa dan menjadi lembaga mitra dengan pemerintah desa.

## **B. SARAN-SARAN**

1. Untuk mencapai sasaran pembangunan sub sector perikanan maka perlu dilakukan usaha melalui pendekatan teknologi. Hal ini akan dilihat pada kemampuan masyarakat nelayan dalam mengadopsi teknologi tersebut, masih

sangat terbatas. Oleh karena itu masyarakat nelayan hendaknya mengusahakan perahu berkapasitas tinggi guna mengangkut hasil yang lebih besar.

2. Tantangan dalam mencapai pertumbuhan khususnya bagi masyarakat nelayan di wilayah pesisir adalah berkaitan dengan aspek teknologi, khususnya transportasi dibidang penangkapan, penanganan pasca panen, permodalan, pasar, kejayaan usaha, sikap mental ; tantangan alam akan menjadi perhatian penting bagi masyarakat nelayan di wilayah pesisir dalam mengembangkan pendapatan dan taraf hidupnya. Oleh karena itu hal-hal yang disebutkan diatas kiranya menjadi perhatian pemerintah.
3. Perlunya pemerataan hasil-hasil pembangunan perikanan khususnya bagi nelayan kecil seperti pemberian paket bantuan yang selama ini hanya dirasakan oleh nelayan-nelayan besar.
4. Hendaknya pemerintah mengambil langkah-langkah atau kebijakan yang berhubungan dengan kepedulian untuk dapat melibatkan berbagai paket program ,rangsangan permodalan, jalinan kemitraan dan jaminan pasar yang sangat menguntungkan masyarakat nelayan itu sendiri,
5. Peningkatan usaha bagi masyarakat nelayan perlu dilakukan dengan usaha motorisasi sehingga masyarakat nelayan akan dapat memperluas wilayah atau area tangkapannya.
6. Masalah pemasaran juga merupakan salah satu hal yang turut mendapatkan perhatian bagi para nelayan karena bagaimanapun produksi perikanan cukup besar apabila tidak didukung dengan pasar maka usaha yang dilakukan oleh para nelayan akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu disarankan perlunya pemerintah menyediakan pasar yang lebih representatif bagi masyarakat

nelayan. Karena masyarakat nelayan seringkali mendapatkan hasil yang banyak namun apabila dijual harga ikan justru akan murah sehingga pendapatannya juga akan rendah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Astrid.S. Susanto, 1997, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial Penerbit CV Rajawali Jakarta.
- Betten, T.R., 1979, Pembangunan Masyarakat Desa terjemahan Surjadi, Bandung : Alumni.
- Beratha, I. Nyoman, 1982, Dewa, Masyarakat Desa, dan Pembangunan Desa, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Bryant Louise dan Coralie White, 1985. Manajemen Pembangunan Untuk Negara-Negara Berkembang (terjemahan), Jakarta : LP3ES.
- Karl Deutsh 1967, Pengantar Ilmu Filsafat Penerbit CV Rajawali Jakarta.
- Siagian S.P., 1988, Prose& Pengelolaan Pembangunan Nasional, Jakarta : Gunung Agung.
- Siswanto Djoko, 1988, Administrasi Pemerintah Dese, Bandung : Armico.
- Sutrisno Hadi, 1986, Methodology Research, Yogyakarta Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Sugandha Dann, 1986. Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi. Jakarta : Intermedia.
- Stoner James & Wankel Charles, 1986. Manajemen. Jakarta Bina Aksara.
- Taliziduhu Ndraha, 1987, Pembangunan Masyarakat, Jakarta: Bina Aksara.
- Busroh, Abu Daud, (1989), *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Kansil, C. S. T., (1995), *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Bumi Aksara.

- , (1991), *Sistem Pemerintahan di Daerah*, Cetakan Ketiga, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Musanef, (1983), *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Poerwadarminta W. J. S. (1983), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta.
- Sinar Gratika, (1999). *Undang-undang Otonomi Daerah*, Tahun 1999, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Saefuddin Ateng, dkk, 2003, *Kebijakan Otonomi Daerah*, Penerbit Pradnya Paramita.
- Sugandha, Dann, (1981), *Masalah Otonomi serta Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Edisi Pertama, Bandung : CV. Sinar Baru.
- Sujamto, (1990), *Perspektif Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sumantri, Sri, (1976), *Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara Asean*, Bandung Tarsito.
- Sumber Suparin, (1986), *Administrasi Pemerintahan Desa*. Rajawali Press, Jakarta.
- Sunindhia, Y. W., (1987), *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Supriatna, Tjahya, (1996), *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Suryaningrat Bayu, (1990), *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Bina Aksara Baru Jakarta.
- , (1981), *Organisasi Pemerintahan Wilayah/Daerah*, Aksara, Baru, Jakarta .
- Suwandi, Made, (2000), *Agenda Strategis Penataan Otonomi Daerah (Sebagai Tindak Lanjut UU No. 22 dan UU No. 25 Tahun 1999)*, (Makalah disampaikan pada Workshop “Strengthening the University to Support Decentralization”) dilaksanakan oleh LPEM UI, IRIS di Jakarta 5 Juni s/d 10 Juni 2000).
- Syafiie, Inu Kencana, (1994), *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tunggal, Hadi Setia, (2000), *Perubahan Pertama UUD 1945 dan Ketetapan-ketetapan MPR Tahun 1999*, Jakarta; Harvarindo.
- Ya’kub, Andi, (2000), *Otonomi Daerah Seluas-luasnya: Paradigma Baru Dalam Pemerintahan Daerah (persepsi masyarakat lokal)* (Makalah, disampaikan pada Workshop “Strengthening the University to Support Decentralization” yang dilaksanakan oleh LPEM UI, IRIS di Jakarta 5 Juni s/d 10 Juni 2000).
- Zulkarnaen, Bonne, Happy, (1993), *Desentralisasi Dan Demokratisasi dan Perspektif Regional (KTI)*, (disampaikan dalam Seminar Nasional X AIPI, tanggal 5-17 September 1993), Dinaset, Manado.